

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667779/2022**

Revisi ke 02
Tanggal : 03 Februari 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (33) | PAPUA BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (667779) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT |
| Sebesar | : Rp. | 793.978.000 (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	793.978.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MANOKWARI | (065) Rp. | 793.978.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

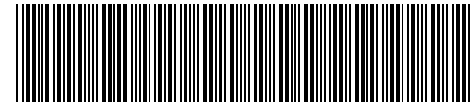
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022

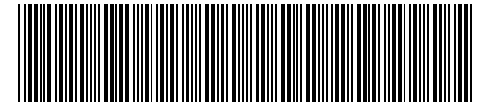


DS:9503-8805-0007-0180

Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	134.983.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	134.983.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	658.995.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	658.995.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



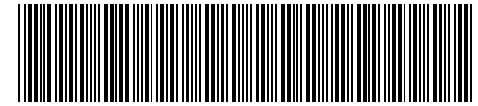
DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi				134.983.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				134.983.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan		29.360.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan		29.360.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga		105.623.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga		105.623.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				658.995.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah				658.995.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum				
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah				
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat		99.090.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat		73.440.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat		25.650.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5,00	Lembaga	54.276.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	5,00	Lembaga	54.276.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		5,00	layanan	89.529.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	4,00	Lembaga	67.885.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	Layanan	21.644.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		47,00	Orang	351.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	47,00	Orang/Kasus	351.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		5,00	Kelompok Masyarakat	65.100.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	5,00	Kegiatan	65.100.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022

I B. SUMBER DANA



DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	793.978.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	793.978.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	783.978	10.000	-	-	793.978		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	134.983	-	-	-	134.983		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	134.983	-	-	-	134.983		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG)	-	29.360	-	-	-	29.360	33 . 51	
01	RM	-	29.360	-	-	-	29.360	065	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG)	-	105.623	-	-	-	105.623	33 . 51	
01	RM	-	105.623	-	-	-	105.623	065@	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	648.995	10.000	-	-	658.995		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	648.995	10.000	-	-	658.995		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG)	-	99.090	-	-	-	99.090	33 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

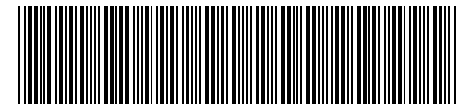
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	99.090	-	-	-	99.090	065@	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG)	-	54.276	-	-	-	54.276	33 . 51	
01 RM		-	54.276	-	-	-	54.276	065	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG)	-	79.529	10.000	-	-	89.529	33 . 51	
01 RM		-	79.529	10.000	-	-	89.529	065	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG)	-	351.000	-	-	-	351.000	33 . 51	
01 RM		-	351.000	-	-	-	351.000	065@	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG)	-	65.100	-	-	-	65.100	33 . 51	
01 RM		-	65.100	-	-	-	65.100	065@	
JUMLAH		-	783.978	10.000	-	-	793.978		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	35.519	155.999	0	118.693	48.322	109.411	52.102	106.918	39.392	51.942	75.682	793.978
		BELANJA BARANG	0	30.899	155.619	0	118.693	48.322	106.911	52.102	106.918	39.392	49.442	75.682	783.978
		BELANJA MODAL	0	4.620	380	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	10.000
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	7.819	59.176	0	0	48.022	0	8.066	7.110	0	0	4.790	134.983
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	7.819	59.176	0	0	48.022	0	8.066	7.110	0	0	4.790	134.983
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	27.700	96.823	0	118.693	300	109.411	44.036	99.808	39.392	51.942	70.892	658.995
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	23.080	96.443	0	118.693	300	106.911	44.036	99.808	39.392	49.442	70.892	648.995
		53 BELANJA MODAL	0	4.620	380	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	10.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022
IV A. B L O K I R**



DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

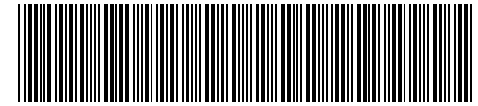
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 233.290	4841.QBA	Disposisi: Automatic Adjustment Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	52 Belanja Barang Rp. 233.290	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.000 Automatic adjustment
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi		
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4841.QBC	Disposisi: Automatic Adjustment Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat
5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.750 Automatic Adjustment
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.582 Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.168 Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		
4841.BDD	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.606 Automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.416 Automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.768 Automatic adjustment		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:9503-8805-0007-0180

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001